

### BAB III

#### KERJASAMA KONTRA TERORISME PREVENTIF DAN DEFENSIF

Bab ini akan menjelaskan mengenai kerjasama kontraterorisme pada masa pemerintahan Joko Widodo dan juga presiden Rodrigo Duterte dengan tindakan preventif dan defensif. Kedua metode tersebut termasuk dalam *soft approach*. Dalam kedua metode tersebut dijelaskan bentuk kerjasama apa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Seperti dalam defensif terdapat kerjasama Intelijen, dan dalam preventif terdapat kerjasama dalam bidang pendidikan juga dalam bidang pencegahan pendanaan keuangan kelompok teroris.

##### 3.1 Bentuk Kerjasama Preventif

Indonesia dan Filipina melakukan kerjasama untuk menanggapi masalah terorisme melalui beberapa tindakan, baik itu *soft approach* maupun *hard approach*. Kerjasama kontra terorisme preventif yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina yaitu Pendidikan dan *Counter Financing Terrorism*. Kedua tindakan tersebut merupakan tindakan pencegahan berkembangnya terorisme pada kedua negara. Pendidikan sebagai pencegahan berkembangnya ideologi-ideologi radikal, dan *counter financing terrorism* sebagai pencegahan dan penekanan pendanaan kelompok teroris agar tidak semakin berkembang

### 3.1.1 Kerjasama Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam pencegahan kekerasan ekstrimis, yang mana juga pencegahan dalam hal yang lebih luas yaitu terorisme, dan juga merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelompok ekstrimis yang menyebarkan ideologinya untuk merekrut anggota dan juga pendukung.<sup>105</sup>

Tidak terdapat bagaimana cara yang benar dan mutlak untuk mencegah atau memberantas radikalisasi, pengetahuan merupakan sesuatu yang luas, dimana pendidikan dapat membantu mencegah mengatasi beberapa penyebab adanya radikalisasi, seorang individu dapat merasakan hal seperti merasa dikucilkan, merasa adanya ketidaksetaraan, kurangnya identitas sipil, juga kebutuhan untuk menjadi bagian dalam suatu komunitas atau kelompok. Pendidikan dapat mengimbangi faktor-faktor tersebut dengan meningkatkan rasa hormat kepada orang lain, menciptakan perdamaian juga melakukan komunikasi. Lebih khususnya, pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi konflik. Terdapat tiga tingkatan yaitu struktural, perilaku, dan juga sikap.<sup>106</sup>

Dalam hal pendidikan, terdapat seorang Pengajar juga memiliki peran penting dalam mencegah radikalisasi. Pengajar memiliki kewajiban untuk memberikan arahan mengajarkan masalah-masalah kontroversial, seperti agama, dan juga adanya perbedaan lainnya, mengenai hak asasi manusia, mengenai

---

<sup>105</sup> Samantha De Silva, *Role of Education in The Prevention of Violent Extremism*, diakses dalam <http://documents.worldbank.org/curated/en/448221510079762554/120997-WP-revised-PUBLIC-Role-of-Education-in-Prevention-of-Violence-Extremism-Final.pdf> (27/09/2019, 09.48 WIB)

<sup>106</sup> Agnese Macaluso, *From Countering to Prevent Radicalization Through Education : Limits and Opportunities*, Working Paper, The Hague Institute For Global Justice, Oktober 2016, diakses dalam <https://www.thehagueinstituteforglobaljustice.org/wp-content/uploads/2016/10/Countering-Preventing-Radicalization-Education.pdf> (27/09/2019, 10.20 WIB)

undan-undang atau peraturan yang ada dalam suatu negara. Siswa perlu memahami nilai-nilai bersama, nilai-nilai yang mendukung ketahanan suatu negara.<sup>107</sup> Tiga tingkatan yang ada dalam pendidikan perlu untuk diimplementasikan dalam proses belajar mengajar.

Tingkat struktural dapat diperoleh dari kepercayaan masyarakat terhadap institusi, adanya interaksi antara siswa merupakan tingkatan perilaku yang akan didapat dalam pendidikan, dan mengajarkan juga memiliki rasa hormat, menghargai terhadap sebuah perbedaan, merupakan tingkatan dari sikap. Mengajarkan nilai-nilai juga merupakan hal yang penting dalam membantu untuk mengembangkan sikap dan perilaku untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian.<sup>108</sup>

Dengan demikian, pengajar perlu memberikan pengertian kepada siswanya bahwa seorang individu dalam satu negara memiliki instansi pemerintahan, dan juga suatu aturan yang harus dipatuhi, individu harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan institusi lainnya, bahwa seorang individu dalam akan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka seorang individu dapat merasa bahwa ia berada dalam lingkungannya sendiri, merasa bahwa ia bagian dalam kelompok, tidak perlu mencari kelompok lain.

Selanjutnya adalah rasa hormat dalam artian saling menghargai, pengajar harus memberikan pengertian bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali

---

<sup>107</sup> *Education and Radicalisation Prevention: Different Ways Government Can Support School and Teacher in Preventing / Countering Violent Extremism* diakses dalam [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation\\_awareness\\_network/about-ran/ran-edu/docs/ran\\_edu\\_different\\_ways\\_governments\\_can\\_support\\_schools\\_teachers\\_052019\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_different_ways_governments_can_support_schools_teachers_052019_en.pdf) ( 29/09/2019, 11.53 WIB)

<sup>108</sup> Ibid

perbedaan, berbeda dalam ideologi, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Sehingga saling menghargai dan menghormati sebuah perbedaan dapat mencegah seseorang untuk melakukan kekerasan atau memaksakan untuk mempercayai apa yang ia percayai.

Dalam tingkatan perilaku, setiap pengajar dapat memberikan pengertian bahwa terdapat hal yang baik untuk dilakukan dan juga hal yang tidak boleh untuk dilakukan, sehingga seorang individu dapat mengerti dan juga dapat berperilaku dengan baik, untuk tidak menyakiti orang lain karena hal itu merupakan perbuatan yang buruk.

Seperti yang telah dijelaskan, rasa memiliki atau perasaan merupakan bagian dalam suatu kelompok merupakan hal yang penting, ketika seorang individu dikucilkan, dan merasa tidak tergabung dalam kelompok manapun, itu merupakan celah bagi kelompok teroris. Kelompok teroris dapat memberikan apa yang seorang individu tersebut tidak dimiliki seperti sebuah kelompok, dan menggunakan hal tersebut untuk melakukan perekrutan.

Teroris atau kelompok teroris dalam melakukan tindakannya atau memutuskan untuk bergabung dalam suatu kelompok memiliki alasan masing-masing. Maka dari itu untuk melawan kelompok teroris dapat dicegah apabila mengetahui akar dari adanya kelompok teroris maupun aksi dari teroris. Salah satu bentuk pencegahan dapat dilakukan melalui adanya pendidikan yang terdapat pengajaran yang benar agar tidak terjerumus dalam kegiatan terorisme. salah satu penyebab adanya terorisme yaitu adanya kesalahpahaman dalam suatu ilmu agama, yang mana dapat memicu seseorang atau kelompok melakukan tindakan

yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dengan cara apapun termasuk meneror, hingga pembunuhan.

Paham yang dianut oleh kelompok terorisme dapat diajarkan dimanapun, selain itu juga dapat melakukan perekrutan dengan cara mencuci otak calon anggotanya tersebut. Karena itu, target dari kelompok teroris seringkali merupakan siswa atau mahasiswa karena mudah untuk dipengaruhi. Maka dari itu, adanya pengetahuan dasar dalam pendidikan wajib disekolah agar dapat menjadi tameng untuk menghindari.

Indonesia dan Filipina juga melakukan kerjasama untuk mencegah adanya terorisme, hal ini dilakukan dengan adanya kerjasama dalam bidang pendidikan. Indonesia dan Filipina bekerjasama dalam bidang pendidikan, dengan memberikan beasiswa bagi pelajar yang ingin belajar, khususnya pada sekolah yang berbasis islam. Hal ini dilakukan untuk menekan radikalisme yang ada, agar tidak semakin bertambah.<sup>109</sup>

Indonesia dan Filipina setuju untuk kerjasama dalam bidang pendidikan, bukan hanya mengajarkan mengenai islam, akan tetapi juga menambahkan nilai dan pemahaman mengenai islam. Dalam kerjasama ini, juga memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia juga Filipina untuk melakukan *student exchange*. Selain untuk pelajar, kerjasama ini juga memberikan kesempatan kepada para pengajar untuk melakukan exchange. Dalam kerjasama lebih lanjut

---

<sup>109</sup> Kemlu, *Strengthening the Relationship, Indonesia-Philippine Promote Islamic Education Cooperation*, diakses dalam <https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Strengthening-the-Relationship,-Indonesia-Philippines-Promote-Islamic-Education-Cooperation.aspx> (05/06/2018, 00.42 WIB)

untuk membuat kurikulum yang sama juga adanya pengembangan pada profesional.<sup>110</sup>

Untuk memulai kerjasama ini, diadakan workshop yang dihadiri oleh 28 partisipan, yang mana terdiri dari institusi terkait untuk melakukan kerjasama dalam bidang ini, seperti kepala NU (nahdlatul Ulama) juga kepala pimpinan Muhammadiyah juga turut hadir. Workshop ini bertujuan untuk merangkai sebuah rekomendasi yang pada akhirnya akan digunakan untuk isi dalam MoU.<sup>111</sup>



**Gambar 3.1 Workshop Kerjasama Pendidikan Indonesia dan Filipina<sup>112</sup>**

Kesempatan ini, diterima dengan baik oleh Filipina, menurut Filipina, Indonesia merupakan sebuah role model dalam pendidikan dengan berbasis islam.

---

<sup>110</sup> ibid

<sup>111</sup> ibid

<sup>112</sup> ibid

Indonesia dan Filipina memiliki tujuan yang sama untuk mencegah adanya gerakan-gerakan ekstrimis dengan melalui pendidikan.<sup>113</sup>

Kerjasama Pendidikan antara Indonesia dan Filipina sebelumnya juga telah berlangsung, Indonesia telah menyediakan 47 beasiswa yang diperuntukkan para guru untuk belajar di Indonesia, khususnya para guru yang berasal dari Mindanao Filipina, yang merupakan kota dengan mayoritas Muslim. Pada perjanjian ini juga, Indonesia membantu Filipina untuk mengembangkan sekolah islam di Filipina selatan, dan Filipina membantu Indonesia untuk mengembangkan pendidikan kejuruan.<sup>114</sup>

Kerjasama ini sebagai penangkal penyebaran ekstrimis hal ini disampaikan oleh menteri luar negeri Retno Marsudi dalam kesempatannya bertemu dengan presiden Rodrigo Duterte. Kerjasama ini sebagai upaya pencegahan berkembangnya teroris. Dalam kerjasama ini yaitu dilakukan penyediaan beasiswa, melakukan seminar atau workshop berbasis Islam, dan pelatihan kepada guru yang disetujui pada 14 Februari 2018.<sup>115</sup>

Kerjasama ini untuk menguatkan fondasi kepercayaan mengenai Islam, agar tidak mudah untuk dipengaruhi oleh kelompok teroris untuk bergabung dalam kelompok teroris agar tidak semakin banyak dan berkembang di kedua negara tersebut.

---

<sup>113</sup> PH Collaborates with Indonesia on Islam Education, diakses dalam <http://www.canadianinquirer.net/2018/01/04/ph-collaborates-with-indonesia-on-islam-education/> (25/09/2019, 11.09 WIB)

<sup>114</sup> Satya Festiani, Indonesia, Philippines Sign Cooperation Agreement on Education, diakses dalam <https://www.republika.co.id/berita/en/jakarta-region-others/15/02/09/njigcf-indonesia-philippines-sign-cooperation-agreement-on-education> (11/09/2019, 11.25 WB)

<sup>115</sup> Jakarta Offers Philippines Islamic Education as Antidote to Extremis, diakses <https://asiancorrespondent.com/2018/01/jakarta-offers-philippines-islamic-education-antidote-extremism/#VY3sjBdC2qhCCU5m.97> (23/10/2019, 14.00 WIB)

### 3.1.2 Kerjasama *Countering Financing of Terrorism*

Pendaan kepada kelompok teroris merupakan sebuah kejahatan yang harus ditindak. Terdapat sejumlah undang-undang yang dibuat untuk mengatasi masalah pembiayaan terhadap kelompok teroris, secara kolektif diberi nama *Countering Financing of Terrorism (CFT)*. Finansial sebuah kelompok teroris merupakan suatu yang penting dalam berjalannya sebuah organisasi, untuk menunjang semua kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok terorisme seperti pembelian senjata, akses transportasi, maka dari itu, untuk mencegah kelompok teroris lebih berkembang, adanya kerjasama dalam hal pengawasan dana masuk dan keluar dalam sebuah negara juga diperlukan

Bank Indonesia juga bank central Filipina melakukan kerjasama *counter financing of terrorism*, dalam kerjasama tersebut Indonesia dan Filipina memiliki pedoman dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, pedoman yang digunakan oleh Bank Indonesia dan Bank Central Filipina adalah FATF (*Financial Action Task Force*). FATF sendiri merupakan badan antar pemerintah yang dibentuk pada tahun 1989 oleh anggota menteri yuridiksi. Tujuan dibentuknya FATF yaitu untuk membuat standar dan mempromosikan juga mengimplementasi secara efektif melalui langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan pembiayaan proliferasi, dan juga ancaman lain yang terkait dengan sistem keuangan internasional.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> *International Standart On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*, diakses dalam <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf> (19/09/2019, 23.08 WIB)



Teroris dalam melakukan kegiatannya membutuhkan uang. Kelompok teroris Internasional membutuhkan uang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok teroris nasional lainnya. Maka dari itu, uang merupakan hal berharga bagi kelompok terorisme. Mencegah dan menghancurkan aliran keuangan harus menjadi pusat strategi.<sup>117</sup>

Dokumen FATF yang digunakan sebagai bahan dalam kerjasama antara bank ini juga memberikan penjelasan mengenai hukuman apa yang akan didapat oleh kelompok teroris. Pendanaan terhadap teroris harus dikriminalisasikan, entah itu organisasi, individu yang merupakan tersangka teroris maupun yang mendanai.<sup>118</sup>

Dalam FATF juga dijelaskan mengenai kerjasama, juga bagaimana institusi finansial bekerja. Setiap institusi finansial harus memberikan persyaratan sesuai dengan *Customer Due Diligence* (CDD) yang mana, (1) harus terdapat hubungan bisnis (2) terdapat transaksi yang melebihi batas yaitu USD/EUR 15.000 (3) adanya kecurigaan pendanaan teroris dan juga pencucian uang (4) lembaga finansial memiliki kecurigaan.

Apabila terdapat seperti yang disebutkan dalam CDD tersebut, maka harus dilakukan (1) identifikasi pengguna dan juga memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan dokumen individu yang sah, (2) melakukan tindakan yang wajar dalam melakukan identifikasi, (3) memahami dan memperoleh informasi tentang tujuan dan hubungan bisnis yang dimaksud, (4) melakukan pengawasan

---

<sup>117</sup> *Importance Action to Implement FATF Standards Counter Terrorist Financing*, diakses dalam <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/importance-urgent-action-to-implement-fatf-standards-counter-terrorist-financing.html> (28/09/2019, 11.07 WIB)

<sup>118</sup> Loc. cit

transaksi dengan konsisten hingga hubungan berakhir.<sup>119</sup> Dengan adanya langkah-langkah tersebut, dapat segera mengetahui apabila terdapat transaksi yang mencurigakan terutama dalam pendanaan terorisme.

Selain FATF organisasi negara-negara di Dunia yaitu PBB melalui *council UNODC ( United Nation Office on Drug and Crime)* memiliki badan legal dalam counter financing terrorism, termasuk juga mempromosikan ratifikasi instrumen legal lainnya yang relevan terhadap counter financing terrorism, khususnya dalam *International Convention for the Suppression of The Financing of Terrorism* (1999), dan mengimplementasikan standar internasional ini. Hal ini memerlukan tinjauan domestik dalam perancangan legislatif, juga perlunya pengembangan peradilan pidana, dan mengatur pejabat hukum untuk menyelidiki, menuntut dan mengadili pendanaan teroris.<sup>120</sup>

Pelaksanaan tersebut dibutuhkan adanya pelatihan khusus mengenai isu-isu tersebut dengan melakukan teknik investigasi khusus, membekukan, menyita aset teroris, dan memperkuat kerjasama regional dan internasional terhadap pendanaan terorisme.<sup>121</sup>

Dokumen terkait dengan pendanaan terorisme juga ada dalam organisasi regional yang Indonesia dan Filipina menjadi anggota, yaitu ACCT (*ASEAN Convention Counter Terrorism*). Dokumen tersebut merupakan dokumen kerjasama regional ASEAN yang membahas mengenai terorisme, dalam dokumen tersebut juga tertulis mengenai pendanaan terhadap terorisme, yang tertulis adalah

---

<sup>119</sup> ibid

<sup>120</sup> *Countering Terrorist Financing*, diakses dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/news-and-events/terrorist-financing.html> (27/09/2019, 12.25 WIB)

<sup>121</sup> ibid

mencegah yang membiayai, merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan tindakan teroris untuk melawan pihak lain, mencegah dan juga menekan pendanaan terhadap teroris. Dokumen tersebut juga disetujui oleh Indonesia dan Filipina.<sup>122</sup>

Pendanaan kelompok teroris merupakan salah satu pokok kerjasama dalam kontra terorisme preventif, dengan adanya dokumen-dokumen juga standar yang mengatur mengenai pendanaan terhadap kelompok terorisme membuktikan bahwa *countering financing terrorism* merupakan hal yang penting dilakukan oleh sebuah negara. Negara juga dapat melakukan kerjasama dalam bidang ini, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina yang melakukan upaya untuk menekan dana kelompok terorisme yaitu dengan kerjasama antar bank nasional, baik Indonesia maupun Filipina.

Bank Indonesia dan juga Banko Sentral Ng Philippines melakukan kerjasama dengan menandatangani MoU untuk mencegah pencucian uang dan juga pendanaan kelompok terorisme. kerjasama kedua pihak ini khususnya dalam hal sistem pembayaran dan juga transaksi keuangan.

Kerjasama antara Indonesia dan Filipina ini melalui dialog kebijakan, pertukaran informasi dan juga data dan juga pengembangan sumber daya manusia. Mou digunakan untuk memperkuat kerangka hukum dan juga implementasi kebijakan yang telah disetujui. Penandatanganan Mou ini juga

---

<sup>122</sup> ASEAN Convention On Counter Terrorism, diakses dalam <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ACCT.pdf> (25/09/2019, 21.54 WIB)

sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memerangi pencucian uang juga juga penandanaan kelompok teroris.<sup>123</sup>



**Gambar 3.2 Kerjasama Bank Indonesia dan Banko Sentral Ng Philippines<sup>124</sup>**

Kerjasama termasuk dalam pencegahan dan juga dapat digunakan sebagai sumber informasi darimana kelompok teroris mendapatkan dana melalui data yang ada pada kedua bank tersebut.

Kerjasama dalam bidang preventif merupakan tahapan awal yang digunakan oleh setiap negara untuk mencegah adanya tindakan terorisme, pada capaian kerjasama preventif ini, tidak dapat dilihat langsung seperti capaian kerjasama bidang lainnya. Dalam melakukan pencegahan, negara sendiri tidak cukup, dibutuhkan peran beberapa pihak seperti sekolah dan juga instansi lain

<sup>123</sup> *Indonesia Philippine Central Bank Agree to Fight Terrorism Financing*, oleh The Jakarta Post pada 05 Agustus 2018, diakses dalam, <https://www.thejakartapost.com/seasia/2018/08/05/indonesian-philippines-central-banks-agree-to-fight-terrorism-financing.html> (11/09/2019, 12.32 WIB)

<sup>124</sup> Loc. Cit.

yang dapat memberikan upaya nya untuk melakukan pencegahan. Salah satunya pendidikan, dan juga instansi finansial.

Dalam kerjasama bidang ini Indonesia dan Filipina melakukan upaya dasar seperti pendidikan Islam untuk mencegah adanya bibit baru terorisme dan juga counter financing terrorism untuk melihat keluar masuknya uang yang ada di Indonesia dan Filipina, dan melihat akun yang diciurigi sebagai akun teroris.

Pendidikan secara umum dapat menjadi wadah bagi seorang individu untuk memahami mengenai ketahanan, kewarganegaraan, dan juga ideologi yang digunakan. Dapat juga menjadi wadah untuk belajar menghormati adanya perbedaan. Dalam hal ini, dapat diberikan oleh pendidik terhadap siswanya, untuk mencegah adanya kesalahpahaman seorang siswa.

Dengan mengimplementasikan tiga tingkatan dalam pendidikan, seperti struktural, sikap, dan juga perilaku, diharapkan seorang individu tidak akan mudah untuk dipengaruhi oleh kelompok teroris sehingga bergabung dalam kelompok tersebut. Tiga tingkatan tersebut harus diimplementasikan dengan baik dalam pendidikan, supaya tidak ada lagi yang mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan dan khususnya tindakan yang mengacu dalam tindakan terorisme seperti yang didefinisikan.

Filipina dan Indonesia melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan berbasis Islam antara Indonesia dan Filipina dengan tujuan untuk menekan paham radikalisi, dengan adanya kerjasama kedua negara diharapkan paham radikal tidak meluas, juga dengan adanya pelatihan terhadap tenaga pendidik diharapkan

agar tenaga pendidik dapat memberikan pengajarann sesuai dengan nilai-nilai islam yang didapatkan dalam pelatihan dan pertukaran tenaga pendidik.

Kerjasama lainnya juga dalam bidang finansial kelompok teroris, dimana Bank Indonesia dan juga bank Central Filipina telah bersepakat untuk melakukan kerjasama yang mana juga berpacu dalam FATF, dalam FATF terdapat beberapa cara untuk mencegah adanya pendaan terhadap kelompok teroris. Bank Indonesia dan Filipina, melihat bagaimana aliran dana dari pengguna bank tersebut, apabila tedapat akun yang memiliki aliran dana yang mencurigakan. Kedua bank tersebut dapat melaporkan akun tersebut, kepada pihak yang berwenang, dan melakukan pemblokiran akun.

Sebelum melakukan tindakan yang lebih lanjut, Bank Indonesia dan bank Bank Central Filipina melakukan pengkajian ulang terhadap akun yang kedua bank tersebut curigai, dengan sesuai aturan yang ada di FATF, sehingga dapat mencegah adanya pendaan terhadap kelompok teroris.

### **3.2 Bentuk Kerjasama Defensif**

Kerjama Intelijen Indonesia dan Filipina termasuk dalam tindakan defensif yang dilakukan oleh kedua negara. Dengan melakukan kerjasama antar intelijen seperti pertukaran informasi dapat melihat pergerakan dari kelompok teroris kedua negara sehingga dapat mengantisipasi kejadian, dan juga dapat menganalisis tindakan apa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Defensif merupakan tindakan pertahanan atau tameng dalam kerjasama kontra terorisme,

untuk menggagalkan serangan teroris dan juga untuk mengurangi kerugian apabila teroris berhasil bertindak.

### 3.2.1 Kejasama Intelijen

Pada kerjasama dalam menangani kasus terorisme, kerjasama antar lembaga intelejen merupakan salah satu kerjasama yang tidak dapat dilewatkan. Kerjasama antar lembaga intelejen Indonesia dan juga Filipina merupakan salah satu contohnya. Intelejen sendiri tidak memiliki standar definisi. Terdapat beberapa pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan intelejen. Intelejen menurut American Heritage Dictionary, 2000 “*The Capacity to Acquire and Apply Knowledge*” atau kapasitas yang digunakan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Definisi lain yaitu

*“intelligence is very general mental capability that, among other things, involve the ability to reason, plan, solve the problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience”*

statement dari 52 ahli. Dalam definisi kedua, dimana intelejen merupakan sebuah kemampuan yang dapat membuat rencana juga menyelesaikan masalah dengan cepat.<sup>125</sup>

Dengan adanya definisi diatas maka Intelejen berfungsi sebagai orang atau lembaga yang dapat mengumpulkan informasi, juga memberikan rencana yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi permasalahan tersebut. Maka dari itu, dalam mengatasi masalah kelompok terorisme, intelejen sangat dibutuhkan, dimana intelejen dapat mencari semua informasi yang berkaitan dengan kelompok

---

<sup>125</sup> Shane Legg & Marcus Hutter, 2006, *A Collection of Definition of Intelligence*, diakses dalam <http://www.vetta.org/documents/A-Collection-of-Definitions-of-Intelligence.pdf> (04/9/2019, 22.57 WIB)

maupun serangan terorisme, karena selama ini, jaringan terorisme bersifat bersembunyi dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba.

Intelejen merupakan sebuah orang atau badan yang bersifat atau identik dengan rahasia, intelejen bekerja dengan cara tertutup agar dengan mudah menganalisis musuhnya. Sumber informasi intelejen juga merupakan suatu kerahasiaan.

Intelejen memiliki dua fungsi dalam melakukan tindakannya, yaitu strategis dan juga taktik. Dalam level strategis fokus utama adalah dengan kebijakan, proses berpikir, kapabilitas, pengkajian memungkinkan tidaknya musuh melakukan serangan. Peran dari strategis adalah untuk melakukan misi yang berkaitan dengan usaha untuk memprediksikan sesuatu, sebelum terjadinya ancaman. Peran intelijen dalam level taktikal adalah dapat didefinisikan sebagai peningkatan kesadaran terhadap target, menentukan waktu dan tipe penyerangan yang dilakukan oleh musuh.<sup>126</sup>

Intelijen dalam menanggulangi masalah terorisme memiliki perang yang penting. Karena intelijen memiliki teknik investigasi yang spesial yang dapat digunakan untuk menemukan teroris, dimana teroris beroperasi dan juga dapat digunakan sebagai metode untuk menangkap dan menghancurkan teroris.<sup>127</sup>

Baik NICA juga BIN merupakan suatu lembaga yang digunakan pemerintah untuk mengamati agas kebijakan yang dikeluarkan berfungsi dengan baik. Indonesia dan Filipina pada akhirnya menyetujui adanya kerjasama dalam

---

<sup>126</sup> Brig Gem G P H Kruys , *The Role of Intelligence in Counterring Terrorism and Insurgency*, diakses dalam [https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/5638/Kruys\\_Role%282007%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/5638/Kruys_Role%282007%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (28/09/2019, 04.18 WIB)

<sup>127</sup> Ibid



menangani Terorisme yaitu kerjasama kontra terorisme yang dimulai pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Benigno Aquino, kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Joko Widodo dan Rodrigo Duterte dalam kerjasama tersebut didalamnya terdapat kerjasama antar Intelijen seperti adanya Sharing Informasi terkait dengan kegiatan teroris.

Seperti kerjasama antar intelijen umumnya, kerjasama ini adalah untuk bertukar informasi intelijen, bertukar data dan pengetahuan oleh BIN (badan Intelijen Nasional) dengan Intelijen Filipina.<sup>128</sup> Dengan adanya kerjasama antar intelijen ini, maka akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan selanjutnya atau langkah apa yang selanjutnya dilakukan.<sup>129</sup>

Dengan adanya kerjasama intelijen akan memperkuat kerjasama Indonesia dan Filipina dalam bidang keamanan lainnya. Kerjasama intelijen juga akan mempermudah pergerakan TNI atau Polri dalam melakukan aksinya, seperti telah dijelaskan kerjasama Intelijen dapat melakukan pertukaran data informasi dengan demikian, dapat dilacak dimana para teroris melakukan aksinya ataupun tempat mereka tinggal atau *base camp* mereka.

BIN dan NICA (*National Intelligence Coordination Agency*) kerjasama untuk mencari data, apabila data telah ditemukan, maka para TNI dan juga tentara Filipina akan bertindak, dengan adanya data tersebut, maka akan lebih mudah

---

<sup>128</sup> BNPT, *Indonesia – Filipina Jalin Kerjasama untuk Perangi Terorisme dan Kejahatan Lintas negara*, di BNPT pada 10 agustus 2017, diakses dalam <https://www.bnpt.go.id/indonesia-filipina-jalin-kerjasama-untuk-perangi-terorisme-dan-kejahatan-lintas-negara.html> (05/06/2018, 00.19 WIB)

<sup>129</sup> Julkifli Marbun, *BIN Aware of Hostage location in Philipppnes*, di Republika, diakses dalam [http://www.republika.co.id/amp\\_version/o4wo3g317](http://www.republika.co.id/amp_version/o4wo3g317) (05/06/2018, 00.20 WIB)

untuk melakukan tindakan, dan dapat menimbang-nimbang hal yang akan dilakukan, apakah akan merugikan atau tidak.

Kerjasama serupa juga dilakukan oleh kedua badan anti teroris dari negara tersebut. BNPT (badan nasional penanggulangan terorisme) dan juga ATC (anti terrorism council) kerjasama yang dilakukan oleh kedua badan anti terorisme ini adalah untuk berdiskusi dan sharing mengenai pengalaman dan juga informasi mengenai penanganan masalah terorisme.<sup>130</sup> Seperti diketahui, bahwa sebelum kedua ini melakukan kerjasama, kedua negara memiliki konsep kontra terorisme yang diimplementasikan kedalam negaranya masing-masing, dan memiliki cara yang berbeda untuk menangani masalah terorisme, dengan adanya sharing informasi dan pengalaman maka diharapkan dapat meningkatkan sistem yang telah diimplementasikan sebelumnya.

Pada kerjasama ini, juga disepakati untuk lebih meningkatkan antar lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memerang, mencegah dan menekan kelompok teroris. dalam hal ini, intelijen juga bertugas untuk mendeteksi dini sebuah tindakan yang dapat mengancam keamanan dan ketahanan negara. Dalam hal ini tugas intelijen sebagai penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap ancaman yang timbul mengancam kepentingan nasional.<sup>131</sup>

Dalam melakukan tugasnya intelijen harus merahasiakan beberapa hal, salah satunya adalah untuk dapat merahasiakan yang dapat membahayakan

---

<sup>130</sup> Adhi, *Indonesia-Filipina Lakukan Pertemuan Bilateral Perangi Terorisme*, di Breakingnews pada 10 agustus 2017, diakses dlam <https://breakingnews.co.id/read/indonesia-filipina-lakukan-pertemuan-bilateral-untuk-perangi-terorisme> (04/06/2018, 23.37 WIB)

<sup>131</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011, diakses dalam <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/17TAHUN2011UU.htm> (23/10/2019, 10.07 WIB)

negara, merugikan kepentingan politik dan luar negeri, dan mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen.<sup>132</sup>

Sesuai dengan fungsi intelijen yang terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia yaitu untuk mendeteksi dini sebuah ancaman bagi negara dan juga hal-hal yang perlu untuk dirahasiakan, maka dalam melakukan pertukaran informasi kedua badan intelijen Indonesia dan Filipina untuk melakukan pertukaran informasi mengenai yang berkaitan dengan hal-hal yang mengancam keamanan kedua belah pihak terutama yang berkaitan dengan pergerakan terorisme. Selain itu juga dalam pertukaran informasi agar tidak merugikan kepentingan nasional kedua belah pihak.



**Gambar 3.3 Kerjasama BNPT dan ATC dalam menanggulangi terorisme<sup>133</sup>**

---

<sup>132</sup> ibid

<sup>133</sup> *Indonesia Filipina Jalin Kerjasama Untuk Perangi Terorisme*, oleh BNPT, diakses dalam <https://www.bnpt.go.id/indonesia-filipina-jalin-kerjasama-untuk-perangi-terorisme-dan-kejahatan-lintas-negara.html> (25/09/2019, 11.03 WIB)

Kerjasama yang dilakukan yang utama yaitu adanya sharing informasi, dimana untuk melakukan sharing informasi ini, kedua negara harus memiliki *trust* terhadap satu dan lainnya, agar kerjasama dapat berlangsung dengan baik.<sup>134</sup> Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan agar dapat bertemu kapan saja disalah satu negara jika diperlukan. Dalam kerjasama tersebut juga dijelaskan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh salah satu pihak tidak boleh untuk disebarkan atau diteruskan kepada pihak ketiga tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya.

Kerjasama yang dilakukan oleh Intelijen dan juga badan anti terorisme kedua negara tersebut menghasilkan sebuah capaian-capaian. Salah satu capaian yang terlihat dari kerjasama intelijen adalah ketika ditawannya WNI oleh kelompok radikal Abu Sayyaf di Filipina. Intelijen kedua negara tersebut bekerjasama untuk membebaskan dan juga mengetahui tempat dimana ditawannya WNI tersebut. Hal ini dijelaskan oleh kepala intelijen Indonesia.

Negosiasi dilakukan oleh pemerintah dan juga jajaran yang bertugas untuk melepaskan WNI yang ditawan oleh Abu Sayyaf, karena kelompok tersebut menolak untuk melepaskan tawanan mereka, kelompok Abu Sayyaf meminta uang untuk membebaskan WNI. Hal itu ditolak, dan tetap mengusahakan untuk bernegosiasi dengan kelompok tersebut. Kepala Intelijen berkata bahwa mereka bekerjasama dengan intelijen Filipina untuk bernegosiasi.

Negosiasi merupakan cara yang tepat yang dapat digunakan untuk melepaskan WNI tersebut. Karena apabila dilakukan penyerangan, dikhawatirkan

---

<sup>134</sup> Emil Mahyudin, 2016, *Tantangan Intelijen dalam Kontra Terorisme di Indonesia*, Intermestic : Journal of International Studies, Vol 1, No 1, pp 23-35.

akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Terlebih kelompok militan Abu Sayyaf tersebut memberikan tenggat waktu, apabila melebihi tenggat waktu yang diberikan, mereka mengancam untuk membutuh tawanan mereka.<sup>135</sup>

Pembebasan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, termasuk dalam tindakan defensif, seperti yang dijelaskan dalam landasan konseptual, defensif merupakan suatu tindakan yang bersifat reaktif, atau menjadi tameng untuk mengurangi kerugian yang akan diakibatkan dari penyerangan tersebut. Badan intelijen dan juga pihak berwajib menimbang-nimbang tindakan mana yang seharusnya diambil dalam hal ini, dan memilih untuk melalui proses negosiasi.

Kerjasama preventif dan kerjasama defensif merupakan kerjasama dengan soft approach, Preventif merupakan tindakan untuk mencegah adanya tindakan terorisme lebih lanjut. Indonesia dan Filipina memiliki kerjasama dalam pencegahan terorisme yaitu dalam bidang pendidikan dan juga financing counter terrorism. Kedua kerjasama tersebut, merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina, sebelum semakin banyak kelompok atau anggota teroris. Dan tindakan preventif juga merupakan tindakan awal yang dilakukan karena bersifat pencegahan sebelum masuk kepada tindakan lainnya.

Tindakan selanjutnya merupakan defensif yang digunakan sebagai tameng apabila tindakan pertama sudah dilakukan, akan tetapi masih ada kelompok teroris yang melakukan tindakannya. Dalam hal ini, terdapat kerjasama antara badan intelijen Indonesia dan juga Filipina yang bekerjasama untuk menangani masalah

---

<sup>135</sup> Rizky Anwika, *BIN Ketahui Lokasi WNI yang disandera, ada WN Kanada dan Belanda Juga*, diakses dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/bin-ketahui-lokasi-wni-yang-disandera-ada-wn-kanada-belanda-juga.html> (12/09/2019, 04.06 WIB)

terorisme. melakukan sharing informasi merupakan hal yang umum digunakan dalam melakukan kerjasama kontra terorisme.

Intelijen Indonesia dan Filipina menggunakan kedua fungsi yang ada dalam Intelijen untuk menghadapi terorisme. yaitu strategis dan juga taktik. Hal ini dilihat dari capaian yang ada, kedua intelijen melakukan proses berfikir, lalu kemudian dapat mengidentifikasi bagaimana kelompok teroris dalam melakukan penyerangan. Membagikan informasi yang dapat membantu untuk menemukan lokasi kelompok teroris. Kemudian untuk dikaji ulang, tindakan apa yang diperlukan untuk melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan merugikan bagi negara.

Indonesia melakukan proses negosiasi yang mana sebelumnya kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan, akan tetapi penyelamatan dapat dilakukan dengan cara bernegosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, Intelijen telah menimbang tindakan tersebut, agar tidak ada kerugian yang lebih besar kemudian hari.